

Kepentingan Amerika Serikat dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara

Frequency of International Relations
March, Vol 2 (1) 56-87
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : April 8, 2020
Accepted : April 11, 2020
Available On-line : Mei 14, 2020

Javira Ardiani
Bima Jon Nanda
Zulkifli Harza

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas
javiraardiani01@gmail.com

Abstract

The United States is a country that seeks to realize denuclearization in Korean Peninsula. Though the United States is not a party that will be directly threatened because the United States has stronger nuclear capability than North Korea's nuclear. This study aims to describe the interests of the United States as a Status Quo State in the process of denuclearization of North Korea. The conceptual framework used by this study is Randall L. Schweller's Range of State Interest concept. This research uses a qualitative research method with descriptive analytical research that uses secondary data. Based on the concept of Range of State Interest, this research found that the United States as a 'Lion' country has an interest in maximizing security which includes maintaining its identity as a nuclear possession country, maintaining trade with East Asian countries, and improving governmental functions. Whereas in maintaining its position, the United States has an interest in maintaining its alliance with South Korea and Japan, maintaining prestige for world peace, and realizing CVID (Complete, Verifiable, and Irreversible Dismantlement) or full denuclearization.

Keywords: United States, Denuclearization, Interest, North Korea, Status Quo State

Pendahuluan

Pada 12 Juni 2018, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan Pemimpin Amerika Serikat, Donald Trump, melakukan pertemuan di Pulau Santosa, Singapura. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama antara pemimpin Korea Utara dan Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat mengalami ketegangan akibat uji coba nuklir Korea Utara. Presiden Trump mengungkapkan bahwa semua pembicaraan berlangsung jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Kim Jong Un juga menyatakan bahwa Korea Utara dan Amerika Serikat memutuskan untuk melupakan masa lalu (BBC News 2019). Hasil dari pembicaraan ini tentunya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan nuklir Korea Utara karena membicarakan persoalan denuklirisasi secara penuh di Semenanjung Korea.

Berbicara mengenai nuklir Korea Utara, Amerika Serikat merupakan pihak yang gigih dalam menciptakan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Padahal, Amerika Serikat sendiri bukanlah negara Asia Timur yang akan langsung terancam oleh pengembangan nuklir Korea Utara. Amerika Serikat berada cukup jauh dari letak Asia Timur yang berada di 26°LU-48LU° dan 67°BB-125°BB. Hal ini membuat keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur sebenarnya akan menimbulkan biaya dan upaya yang tidak sedikit seperti

pelatihan gabungan, pemasangan THAAD, dan pengiriman armada perang (Kamasa 2014, 73).

Selain itu, jumlah nuklir Amerika Serikat telah mencapai 6.185 total inventaris (SIPRI 2019, 11). Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan nuklir milik Korea Utara yang hanya diperkirakan berjumlah 20-30 total inventaris (SIPRI 2019, 11). Perbandingan ini menunjukkan bahwa kemampuan nuklir Korea Utara bukanlah ancaman yang serius bagi Amerika Serikat. Namun, tak bisa dihindari fakta bahwa kesepakatan aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun membuat Amerika Serikat terus mengambil tindakan dalam stabilitas keamanan Semenanjung Korea.

Terkadang, tindakan yang diambil Amerika Serikat justru membuat denuklirisasi semakin jauh untuk dicapai. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari upaya diplomasi multilateral *Six Party Talks*, keberadaan pasukan militer AS di Korsel dan Jepang yang berpengaruh dengan dinamika politik dan keamanan di Asia Timur terutama pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama, serta pembuatan Pengoperasian sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Semenanjung Korea (Aldikawati 2012, 45).

Kerjasama dan aliansi keamanan dengan Korea Selatan untuk memperkuat keamanan domestik Korea Selatan dari ancaman keamanan kawasan, dilakukan dengan transfer teknologi persenjataan dan penempatan pasukan militer di Korea Selatan. Jumlah pasukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan hampir mencapai 35.000 pasukan pada tahun 2016 (Marpaung 2017, 4). Amerika Serikat juga telah mendesak Korea Selatan untuk mengembangkan atau memperoleh kemampuan BMD (*Ballistic Missile Defense*) yang canggih dan mengintegrasikannya dengan sistem BMD Amerika Serikat dan sekutu di wilayah ini. Hal ini dinamakan *Terminal High Area Defense* (THAAD) sebagai upaya pertahananrudalbalistik.

Selain itu, Amerika Serikat dengan Jepang juga saling bersepakat dalam perjanjian keamanan dan aliansi bersama. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan justru semakin menjadi ancaman bagi negara non-aliansi Amerika Serikat termasuk Korea Utara, intervensi Amerika Serikat di kawasan dipandang sebagai upaya untuk mengancam keamanan nasionalnya (Syahrin 2018, 125). Dibawah pemerintahan Obama, Amerika Serikat pun menerapkan strategi '*Strategic Patience*' untuk menanggapi permasalahan Korea Utara, yang mana kebijakan ini mengupayakan adanya negosiasi dengan Korea Utara terkait denuklirisasi dengan cara '*Wait*' dan

pemberian tekanan terhadap Korea Utara (Rantung 2016, 5). Namun, pada awal tahun 2017 Presiden Donald Trump melalui deklarasi Wakil Presiden, Mike Pence menyatakan bahwa kebijakan keamanan Amerika Serikat '*Strategic Patience*' telah berakhir.

Sebelum melakukan pertemuan bilateral dengan Kim Jong Un, Donald Trump juga mendukung pertemuan bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan pada 27 April 2018. Setelah pertemuan bilateral Korea Utara-Korea Selatan, Presiden Trump merencanakan pertemuan dengan Kim Jong-un yang akan melakukan pembahasan nuklir. Dengan terus aktifnya Amerika Serikat dalam upaya denuklirisasi Korea Utara, penting untuk mengetahui lebih lanjut kepentingan yang hendak dipenuhi Amerika Serikat dalam upaya ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mencoba menjelaskan proses secara detail. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan, yang mana peneliti terlebih dahulu menganalisis literatur yang telah ada untuk menemukan permasalahan yang belum ditemukan jawabannya. Kemudian peneliti akan menjelaskan jawaban penelitian melalui indikator yang telah ada dalam kosep hubungan internasional sebelumnya.

Status Quo vs Revisionist State

Neoclassical-Realism merupakan perspektif yang menggabungkan teori realis klasik dan teori neo realis. Perspektif ini menjelaskan bahwa tindakan negara dapat dijelaskan dengan variabel sistemik (penyebaran kekuasaan di beberapa negara), variabel kognitif (persepsi terkait ancaman), dan variabel domestik (lembaga negara atau tokoh masyarakat) yang mempengaruhi kekuasaan. Perspektif ini mengakui mengenai *Balance of power* ala neorealis tetapi perspektif ini melihat bahwa jika pemimpin suatu negara gagal melakukan penyeimbangan, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan sistem internasional (Davidson 2008, 76).

Dalam perspektif ini dikenal karakteristik negara yang terbagi atas *Status Quo State* dan *Revisionist State*. A.F.K. Organski dan Jacek Kugler menyatakan bahwa negara status quo sebagai pihak yang telah berpartisipasi dalam merancang ‘aturan main’ dan menerima manfaat dari aturan ini. Sedangkan negara revisionis menginginkan tempat baru untuk diri mereka sendiri dalam masyarakat internasional. Negara-negara Revisionis menyatakan ‘ketidakpuasan umum’ terhadap posisi mereka dalam sistem sehingga mereka memiliki keinginan untuk menyusun kembali aturan yang digunakan dalam hubungan antar negara. Indikator yang paling jelas dalam mengidentifikasi negara revisionis ialah sudut pandang para pemimpin negara tersebut. Menurut Randall Schweller, negara

revisionis menghargai apa yang mereka miliki saat ini, tetapi menginginkan lebih dari apa yang mereka miliki saat ini. Mereka akan cenderung menggunakan kekuatan militer untuk mengubah status quo (Johnston 2003, 20).

Kekuatan revisionis digambarkan sebagai negara yang sangat peduli terhadap prestise di atas semua pertimbangan, dan berusaha merombak sistem dan ketertiban internasional untuk keuntungannya sendiri (Combes 2012, 5). Ketidakpuasan memotivasi mereka untuk tidak memedulikan kekuatan dominan dan sekutu-sekutunya, sehingga negara revisionis cenderung mengabaikan kekuatan dominan dan lebih berfokus untuk membuat sistem berubah. Ketika kekuatan status quo lebih kuat dibandingkan negara revisionis, maka status sistem akan tetap stabil. Namun, jika kekuatan revisionis lebih kuat daripada pembela status quo, maka sistem pada akhirnya akan berubah.

Jika dilihat dari sistem internasional yang ada pada saat ini kita melihat bahwa kekuatan dominan dipegang oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, Korea Utara hanyalah negara yang memiliki power yang berada di bawah negara-negara dominan. Korea Utara merasa tidak puas dengan posisinya di sistem karena dengan posisi yang lemah membuat Korea Utara lebih mudah terancam terutama dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, Korea Utara ingin

merubah sistem internasional yang telah ada dengan melakukan Pengembangan Nuklir di negaranya. Korea Utara menunjukkan kepada dunia bahwa mereka juga memiliki senjata militer yang serius. Dari hal tersebutlah dapat dilihat bahwa Korea Utara berusaha menjadi *Revisionist State*.

Range of State Interest

Balance of interest merupakan konsep dari Neorealisme klasik yang berupaya merevisi konsep *balance of power* dan *balance of threat*. Konsep ini dapat bermakna ganda yaitu mencakup kepentingan negara di level unit maupun level sistemik (Schweller 1994, 99). Untuk menjelaskan konsep ini, Randall L. Schweller menegaskan adanya 'range' yang bisa menjelaskan posisi dan kepentingan suatu negara. *Range* ini diisi oleh negara yang mempertahankan status quo dan negara yang ingin perubahan atau revisi terhadap sistem. *Range of State Interest* dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Range of State Interest

	Negara yang puas dengan (status quo)		Negara yang tidak puas (Revisionis)	
	<i>Lion</i>	<i>Lamb</i>	<i>Jackal</i>	<i>Wolves</i>
Kepentingan	<i>Self-Preservation</i>	<i>Self-abnegation</i>	Tujuan yang terbatas	Tujuan yang tidak terbatas
Tindakan	<i>Balancing</i> atau <i>Buckpassing</i>	<i>Appeasement and wave-of-the-future bandwagoning; distancing</i>	<i>Jackal Bandwagoning</i>	Resikoagresi

Sumber: Range of State Interest (Schweller 1996, 99)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa *Lions* merupakan negara yang akan membayar tinggi untuk melindungi apa yang mereka miliki. Sebagai pihak yang puas, negara ini akan mempertahankan kondisi yang telah ada (*status quo*). Oleh karena itu, negara *Lions* cenderung melakukan tindakan *balancing* atau *buckpassing* untuk mempertahankan posisi dan memaksimalkan keamanan mereka. *Balancing* merupakan tindakan penyeimbangan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang berpotensi menciptakan ancaman agresi. Sedangkan, *Buck passing* merupakan strategi suatu negara untuk mencegah agressor dengan memanfaatkan negara lain sementara negara ini tetap mematuhi pedoman (Mearshimer, 157-158).

Sedangkan, *lamb* merupakan negara yang akan membayar rendah untuk pertahanan dan perluasan nilai mereka. Dalam sistem

internasional, negara tipe ini merupakan negara yang memiliki kapabilitas lemah, baik dari segi politik, ekonomi, maupun pertahanan. Oleh karena itu, untuk menjaga dirinya tetap aman, negara ini hanya bertujuan untuk *Self-abnegation* (Schweller 1994, 101-102).

Ketika suatu negara tidak bisa mengikuti dinamika keseimbangan atas polaritas kekuatan yang ada dalam sistem, maka negara tersebut rentan menjadi sasaran dominasi dan ekspansi negara lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak puas dengan sistem internasional yang ada ialah negara-negara yang berada dalam *range jackal* dan *wolves*. *Jackal* merupakan negara yang akan membayar tinggi untuk mempertahankan apa yang mereka miliki, tetapi mereka juga akan biaya yang lebih besar lagi untuk memperluas nilai-nilai yang mereka miliki (Schweller 1994, 103). Namun, negara dalam *range* ini cenderung tidak ingin mengambil resiko sehingga negara ini lebih sering mengikuti *lion* (negara pemimpin status quo) yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, negara dengan *range Jackal* sering memilih tindakan *bandwagoning*.

Walaupun *Jackal* dan *wolves* merupakan pihak yang tidak puas terhadap status quo, tetapi *wolves* merupakan pihak yang lebih ambisius untuk mencapai apa yang mereka idamkan. Oleh karena itu, negara dalam *range* ini cenderung bersedia mengambil resiko besar

untuk memperbaiki kondisi mereka yang mereka anggap tidak dapat ditoleransi lagi. Tanpa rasa takut akan kehilangan, pihak ini akan berusaha mengejar ekspansi sembrono (Schweller 1994, 103-104)

Dalam sistem internasional, kita dapat melihat bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang sudah memiliki kekuatan besar. Sementara itu, Korea Utara merupakan negara yang berupaya untuk mengubah keadaan negaranya dalam sistem internasional. Pada penelitian ini penulis akan mengkategorikan Amerika Serikat sebagai *lion*. Sedangkan Korea Utara merupakan negara yang sedang menuju *range wolves*. Hal tersebut dikarenakan Korea Utara berusaha untuk berani untuk mengambil resiko untuk membuat negaranya diakui mempunyai posisi yang diperhitungkan di sistem internasional.

Dalam menganalisa Amerika Serikat, peneliti akan berfokus pada *range Lion*, yang mana negara dalam *range* ini memiliki tujuan primer untuk *Self Preservation*. Tujuan *Self Preservation* berarti negara berupaya untuk maksimalisasi keamanan (*Security Maximizer*) dan mempertahankan posisi (*maintain position*). Untuk mencapai maksimalisasi keamanan maka kepentingan yang harus dicapainya adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan identitas independen

Setiap negara memiliki identitas masing-masing yang akan dipertahankan. Negara *Lion* sendiri biasanya memiliki identitas sebagai pemenang perang atau negara pemilik ekonomi dan keamanan yang terkuat. Identitas inilah yang akan dipertahankan oleh negara *Lion*.

2. Mempertahankan perdagangan positif

Dalam memaksimalkan keamanannya, setiap negara juga perlu memperhatikan bidang ekonomi. Perhatian tersebut biasanya meliputi penguatan ekonomi domestik dan kegiatan ekspor-impor dengan negara lain (Schweller 1997, 928).

3. Meningkatkan integritas fungsional

Negara harus bisa mengintegrasikan kepentingan yang ingin dicapai oleh unit-unit dalam domestiknya. Selain itu, negara juga perlu mempertimbangkan tekanan sistem internasional (Schweller 1996, 102).

Sedangkan untuk mempertahankan posisi, maka negara ini harus mencapai kepentingan sebagai berikut :

1. Mempertahankan aliansi

Dalam mempertahankan posisi dalam sistem, suatu negara juga perlu mempertahankan aliansinya yang bisa memberikan keuntungan

untuk negara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan prestise negara *lion* sebagai negara pelindung, terutama bagi aliansinya..

2. Mempertahankan prestise

Dengan menduduki posisi paling atas dalam sistem, maka negara *lion* akan mempertahankan posisi dirinya sebagai penjaga ketertiban dunia. Negara ini tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap aliansinya dari ancaman pihak lain.

3. Mencegah agresi (*Frightened the Wolves*)

Sebagai pengelola sistem, negara *lion* akan menekan pihak manapun yang berpotensi untuk mengacaukan sistem yang telah didominasinya selama ini (Schweller 1994, 101).

Result/Hasil

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tujuan dasar keamanan nasional Amerika Serikat adalah pengaruh global, yaitu memperoleh dan mempertahankan supremasi (Lim 2011, 7). Tujuan dasar untuk Amerika Serikat adalah untuk '*preserve*' dalam posisinya di dunia internasional. Jika merujuk pada konsep '*Range of State*' versi Randall Schweller, Amerika Serikat merupakan negara dengan *range Lion*. Hal tersebut berarti bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang puas dengan sistem yang telah ada.

Ketika kekuatan status quo lebih kuat dibandingkan negara revisionis, maka status sistem akan tetap stabil. Namun, jika kekuatan revisionis lebih kuat daripada pembela status quo, maka sistem pada akhirnya akan berubah. Hal inilah yang diantisipasi Amerika Serikat dari pengembangan senjata nuklir Korea Utara beserta dinamika hubungan di Asia Timur. Jika Amerika Serikat gagal untuk menekan Korea Utara sebagai *Revisionist state* yang cenderung bertindak agresif, maka sistem akan berubah. Perubahan yang terjadi juga tentunya akan mempengaruhi status atau posisi Amerika Serikat di sistem internasional.

Tindakan Amerika Serikat dalam keterlibatannya di proses denuklirisasi Korea Utara selalu mengalami perubahan (baik secara diplomatik maupun koersif). Perubahan tindakan ini juga dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat. Namun, tujuan dasar Amerika Serikat tidak pernah berubah. Tujuan primer dari negara ini adalah *Self Preservation* yang meliputi kepentingan untuk memaksimalkan keamanan (*Maximizing Security*) dan mempertahankan posisi (*Maintaining Position*). Hal ini sesuai dengan strategi nasional pertahanan Amerika yang menyebutkan "*..military forces needed to deter war and protect the security of our nations*" (Mattis 2018, 1).

Maximizing Security

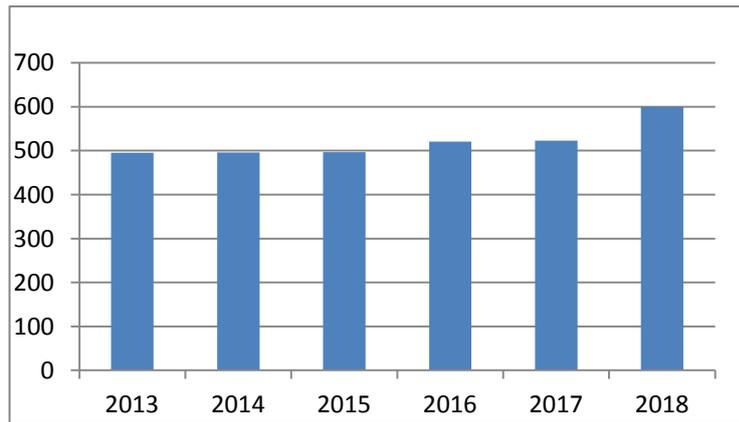
Terdapat perdebatan mengenai kepentingan negara *Status Quo*, yaitu memaksimalkan keamanan atau memaksimalkan power mereka. Menurut Waltz, setiap negara memang memiliki kepentingan untuk mempertahankan keamanan negaranya. Jika negara tersebut merupakan negara *status quo*, maka negara tersebut akan tetap memaksimalkan keamanannya walaupun tingkat keamanan yang dimaksimalkan tidak sama dengan negara lainnya (Schweller 1997, 85).

Hal tersebut dikarenakan, dalam anarki, keamanan adalah akhir tertinggi yang dicapai oleh negara. Jika negara memiliki keamanan yang terjamin, maka ketenangan, keuntungan, maupun power akan mudah untuk diraih sehingga Amerika Serikat dalam hal ini juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keamanannya. Untuk memaksimalkan keamanan maka kepentingan yang harus dicapai Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan identitas independen

Sebagai negara yang independen, Amerika Serikat merupakan negara yang tetap berupaya untuk tidak bergantung kepada negara lain. Negara ini justru akan membuat negara-negara lain memiliki ketergantungan agar bisa mendominasi. Sebagai *super power*, Amerika Serikat akan berupaya menghadapi ancaman agresif, mencari sekutu, dan membangun kekuatan militernya (Lind 2004,

104). Rasa tidak aman mendorong negara untuk mencari kekuatan relatif (Hwang 2004, 17). Hal ini menyebabkan anggaran militer Amerika Serikat terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut merupakan anggaran dasar pertahanan Amerika Serikat :



Grafik 4.1 Anggaran Dasar pertahanan Amerika Serikat 2013-2018 (dalam juta Dolar Amerika Serikat)

Sumber : DoD Topline Funding 2010-2024

Dari grafik dapat dilihat bahwa anggaran militer Amerika Serikat meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2018. (Secretary of Defense 2019). Hal ini dikarenakan Amerika Serikat merasa ancaman nuklir Korea Utara dapat mempengaruhi identitas Amerika Serikat. Kepentingan ini juga sesuai dengan tindakan Amerika Serikat dalam melakukan latihan gabungan USFK di Korea Selatan. Kekuatan militer ini digunakan untuk menekan Korea Utara, seperti yang dilakukan pada tahun 2017. Dengan terwujudnya denuklirisasi, Amerika Serikat bisa mempertahankan kepada pertahanan dan

keamanan negaranya. Selain itu, Amerika Serikat juga bisa menghindari perang dan mencapai kepentingannya yang lain.

Selain itu, sebagai negara pemenang Perang, Amerika Serikat dan keempat negara lainnya memiliki hak untuk memiliki senjata nuklir. Identitas ini akan terganggu jika negara lainnya memiliki senjata nuklir. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat dan negara pemiliki resmi nuklir lainnya, mengklaim bahwa kepemilikan senjata nuklir mereka adalah untuk menjaga stabilitas keamanan. Sementara, negara non pemilik tidak berkomitmen untuk menjaga perdamaian. Oleh karena itu, denuklirisasi Korea Utara juga penting untuk mempertahankan identitas negara pemilik nuklir yang resmi sesuai NPT (Permata 2019, 108).

2. Mempertahankan perdagangan positif

Meskipun isu nuklir Korea Utara merupakan permasalahan di bidang keamanan, tetapi bukan berarti isu ini tidak berdampak kepada bidang lain seperti ekonomi. Aktivitas Korea Utara dinilai mengganggu kestabilan kawasan dan hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara di Asia Timur, bahkan dengan Korea Utara. Uji coba nuklir membuat Amerika Serikat mempertimbangkan akan memutuskan hubungan ekonomi dengan seluruh negara yang melaksanakan hubungan dagang dengan Korea

Utara (BBC News, 2017). Hal ini dilakukan Amerika Serikat dalam beberapa pembentukan UNSCR nomor 1874, 1887, dan 2094.

Jika isu nuklir ini tidak cepat diselesaikan maka Amerika Serikat akan sulit mempertahankan perdagangan yang positif karena pada saat ini. Selain itu, Tiongkok juga merupakan kompetitor Amerika Serikat dalam bidang ekonomi yang bisa mempengaruhi hubungan dagang Amerika Serikat dengan negara lain.. "*China is strategic competitor using predatory economics..*" (Mattis 2018, 1). Menurut majalah *The Economist*, Tiongkok akan menyusul GDP Amerika Serikat pada 2018 (Logan 2013, 12).

Selain itu, nuklir Korea Utara juga dapat mengganggu stabilitas Jepang dan Korea Selatan di kawasan. Kedua negara ini merupakan partner ekonomi yang penting bagi Amerika Serikat. Jepang berada pada urutan keempat sebagai *top trading partner* bagi Amerika Serikat pada 2017 dengan total 204,2 milyar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Korea Selatan menduduki urutan keenam dengan total 119,4 milyar dollar Amerika Serikat pada 2017 (Gray 2019). Jika kedua negara ini stabilitasnya terganggu dan tidak bisa melakukan perdagangan, maka Amerika Serikat akan kehilangan transaksi perdagangan sekitar 323,6 milyar dolar Amerika Serikat.

3. Meningkatkan integritas fungsional

Dalam meningkatkan integritas fungsional, maka negara perlu memperhatikan pengaruh politik dan kekuatan pemimpin beserta struktur pemerintahan lainnya. Masyarakat Amerika Serikat dan struktur pemerintahan lainnya setuju bahwa nuklir Korea Utara perlu diakhiri. Hal ini memperlihatkan untuk meningkatkan integritas fungsional, Amerika Serikat memang perlu mengeliminasi dan menghapus segala infrastruktur pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Selaku pemimpin Amerika Serikat, Trump memiliki tanggungjawab untuk mempertimbangkan tindakan atau upaya yang akan diambil terkait isu internasional. Sesuai dengan neorealisme klasik, negara tidak bisa hanya berfokus kepada salah satu dari sistem atau unit (domestik). Oleh karena itu, denuklirisasi berusaha diwujudkan untuk memenuhi input dari domestik dan sistem internasional sendiri. Begitu pula yang dilakukan oleh pemimpin Amerika Serikat lainnya.

Senat Demokrat Amerika Serikat mengirimi Donald Trump surat mengenai desakan untuk tindak lanjut permasalahan denuklirisasi Korea Utara. Surat itu mengandung pernyataan *“We write to express our grave concern regarding your policy and diplomacy with North Korea”* dan *“and to urge you to redouble efforts to forge a successful and durable path toward denuclearization of North Korea..”*

(LeBlanc dan Cohen 2019). Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa bukan hanya Presiden Amerika Serikat yang menginginkan denuklirisasi. Dikarenakan nuklir Korea Utara memang dianggap ancaman oleh masyarakat, struktur pemerintahan, dan aliansi regional Amerika Serikat maka pemimpin Amerika Serikat perlu mewujudkan denuklirisasi sebagai upaya mencapai integrasi fungsional. Jika integritas fungsional terwujud, maka Amerika Serikat akan lebih mudah untuk mencapai kepentingan lainnya.

Maintaining Position

Sebagai negara *Lion*, Amerika Serikat merupakan negara yang berperan dalam mengatur dan mengelola sistem internasional. Di level sistemik, Amerika Serikat akan berupaya melakukan distribusi kapasitas untuk tetap memiliki posisi sebagai pengelola dan penerima manfaat dari sistem yang dikelolanya. Hal ini membuat Amerika Serikat juga bertujuan untuk mencegah adanya perubahan dalam sistem, khususnya yang dapat mengancam posisinya. Untuk mempertahankan posisi, maka negara ini harus mencapai kepentingan sebagai berikut :

1. Mempertahankan aliansi

Di Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan merupakan aliansi Amerika Serikat di bidang ekonomi maupun pertahanan. Aliansi

antara Amerika Serikat dan Korea Selatan terikat dalam *Mutual Defense Treaty*. Sedangkan Amerika Serikat-Jepang terikat dalam *US-Japanese Security Treaty*. Ikatan ini menguntungkan semua pihak yang beraliansi, seperti saling mendukung saat salah satu pihak sedang membutuhkan bantuan dan dukungan. Contohnya Korea Selatan pernah mendukung Amerika Serikat dalam kampanye perangnya terhadap Vietnam dan Irak (Marpaung 2017, 2). Begitu pula yang dilakukan oleh Jepang sehingga Amerika Serikat juga harus memberikan bantuan kepada Jepang dan Korea Selatan saat mereka terancam di kawasannya.

Dalam mempertahankan posisi, Amerika Serikat perlu juga mempertahankan pihak yang menjadi sekutunya. Dalam upaya denuklirisasi Korea Utara, Amerika Serikat tentu mencoba melindungi aliansinya Korea Selatan, dan juga Jepang, agar terhindar dari ancaman nuklir Korea Utara. Jika perlindungan telah berhasil dilakukan maka aliansi akan tetap bertahan menjadi pihak yang mendukung Amerika Serikat dalam mengelola sistem internasional. Kepentingan ini sesuai dengan pernyataan *“Collectively, our force posture, alliance, and partnership architecture, and department modernization will provide the capabilities and agility required to prevail conflict and preserve peace through strength.”* (Mattis 2018, 1).

Oleh karena itu, Amerika Serikat membangun pertahanan rudal balistik THAAD di Korea Selatan untuk melindungi aliansinya ini dari ancaman nuklir Korea Utara. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan latihan gabungan dengan Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 2017, latihan gabungan antara Jepang dan Amerika Serikat melibatkan 14.000 tentara Amerika Serikat, kapal induk, dan kelengkapan perang lainnya (Amanda 2018, 161).

2. Mempertahankan prestise

Sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat merupakan negara yang paling mendominasi sistem internasional. Hal tersebut dikarenakan Amerika menduduki posisi teratas sebagai negara dengan kekuatan militer dan kapabilitas ekonomi dunia. Sebagai negara dominan, maka Amerika Serikat memiliki prestise yang tinggi untuk membuat sistem internasional tetap stabil di bawah kendalinya, terutama sistem yang telah ada di Asia Timur pada saat ini. Maksudnya, Amerika Serikat perlu melindungi kedua aliansinya di kawasan ini. Dengan begitu, prestise Amerika Serikat sebagai negara yang melindungi aliansinya akan tetap bertahan. Jika Amerika Serikat tidak berhasil dalam mewujudkan denuklirisasi Korea Utara, maka negara ini juga tidak berhasil menjaga sistem yang sudah dikelolanya.

Dalam dokumen *summary* dari strategi pertahanan nasional Amerika Serikat terdapat pernyataan “..*National Defense Strategy articulates our strategy to compete, deter, and win in this environment..*”. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk berkompetisi, mencegah dan menang dalam dunia internasional. Dalam upaya denuklirisasi Korea Utara, Amerika Serikat berupaya untuk menghapus segala kegiatan dan infrastruktur nuklir Korea Utara untuk tetap mempertahankan prestise sebagai negara ‘pemenang’ dan penjaga perdamaian dunia. Berbeda dengan Tiongkok yang memiliki tujuan untuk stabilitas kawasan sedangkan Amerika Serikat menginginkan denuklirisasi yang bersifat CVID. Amerika Serikat terancam oleh kebangkitan Tiongkok dan Semenanjung Korea merupakan ‘*flash point*’ Amerika Serikat dan Tiongkok untuk berkompetisi (Kim Min Hyung 2015, 5).

Untuk kepentingan prestise ini, Amerika Serikat melakukan beberapa tindakan. Pertama, Amerika Serikat mampu mendorong pembuatan UNSCR yang khusus ditujukan pada Korea Utara pada tahun 2009 dan 2013. Kedua, Amerika Serikat juga menekan Korea Utara dengan ancaman seperti ancaman perang tahun 2017 (CNN Indonesia 2017). Selanjutnya, Amerika Serikat juga memperlihatkan bahwa negara ini mampu melibatkan Korea Utara dalam pembicaraan bilateral pada 2018.

3. Mencegah agresi (*Frightened the Wolves*)

Salah satu tujuan dasar dari negara *Lion* ialah untuk mencegah pihak lain mencapai kemajuan dalam kemampuan relatifnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya mewujudkan denuklirisasi Korea Utara untuk mencegah Korea Utara memiliki kemajuan yang dapat mengubah sistem yang ada. Korea Utara sendiri merupakan negara yang berada dalam *range wolf* karena mengembangkan dan menguji coba senjata nuklir sehingga menimbulkan terganggunya stabilitas kawasan. Dalam pandangan Amerika Serikat, Korea Utara juga merupakan '*rogue state*' karena tidak pernah menepati janjinya untuk denuklirisasi. Seperti pada 2009, Korea Utara justru menarik diri untuk kerjasama dengan IAEA dan menguji coba nuklirnya setelah dilakukan negosiasi yang dibicarakan melalui *Six Party Talks* (Dewitasari 2011, 54). Tindakan yang diambil Amerika Serikat dalam merespon hal ini ialah menambah pasukan USFK terutama sejak tahun 2009 (Yeow 2010, 114).

Amerika Serikat percaya bahwa penggunaan tekanan dan pengaruh akan mampu mengubah tindakan Korea Utara (Xu 2014, 4). Namun, denuklirisasi *step by step* telah dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi selalu gagal (Zelikow 2018, 3). Korea Utara selalu menawarkan diri untuk menyerah dalam uji coba nuklir dengan

mendapatkan kebutuhan yang diperlukan negaranya, tetapi negara ini selalu tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dengan terus mengembangkan dan menguji coba nuklir. Contohnya seperti Persetujuan Korea Utara terhadap penghentian uji coba nuklir di Yongbyon pada 9 Februari 2012 dengan syarat pemberian bantuan Amerika Serikat terkait kebutuhan bahan-bahan makanan (Izharuddin 2014, 30). Namun, setelahnya Korea Utara masih mengembangkan nuklir dan menguji coba kembali pada Desember 2012.

Dalam mencegah agresi, Amerika Serikat akan mencoba untuk mengancam Korea utara (*Frightened the wolves*) agar tidak melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas lagi. Oleh karena itu, pada 2017 Amerika Serikat mengancam untuk mengirimkan armada perang besar-besaran ke Korea Utara jika Korea Utara tidak berhenti menguji coba misilnya (CNN Indonesia 2017). Amerika Serikat juga membangun terminal pertahanan THAAD di Korea Selatan untuk merespon uji coba nuklir Korea Utara serta melakukan latihan perang gabungan dengan Jepang dan Korea Selatan. Ancaman-ancaman ini digunakan untuk ‘menakuti’ atau menekan Korea Utara bahwa Amerika Serikat adalah negara yang kuat sehingga Korea Utara mau melakukan negosiasi untuk denuklirisasi.

Jika denuklirisasi berhasil diwujudkan, maka Amerika Serikat telah berhasil untuk mencegah agresi yang dilakukan oleh negara 'nakal'. Dalam upaya perwujudan denuklirisasi Korea Utara, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat sebagai negara '*lion*' ingin memperlihatkan bahwa ia mampu mengontrol '*wolf*' (Korea Utara) untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dunia. Hal ini tentunya akan mendorong negara lain untuk tetap mengikuti sistem yang ada dan tidak mencari masalah dengan negara 'penguasa'.

Kesimpulan

Peneliti menemukan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang berada dalam posisi *Lion*. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara (yang saat ini) berada dalam '*first rank*', yang mana negara ini menduduki posisi pertama sebagai negara paling kuat dalam perekonomian dan pertahanan. Selain itu, negara ini juga melakukan tindakan *balancing* dalam mewujudkan denuklirisasi Korea Utara. Menurut *Range of State Interest* milik Randall L. Schweller, negara dengan range *Lion* memiliki tujuan primer untuk *Self Preservation* yang meliputi maksimalisasi keamanan dan mempertahankan posisi. Dalam memaksimalkan keamanannya, pertama, Amerika Serikat mempertahankan perdagangan positif dengan memastikan bahwa hubungan ekonomi dengan negara lain berjalan baik. Sementara itu, permasalahan nuklir

Korea Utara membuat Amerika memiliki kendala dalam melanjutkan hubungan ekonomi, khususnya negara yang memberikan bantuan kepada Korea Utara. Untuk itu, Amerika Serikat berusaha mempertahankan kepentingan untuk perdagangan yang positif dengan adanya denuklirisasi Korea Utara secara penuh.

Kedua, sebagai negara *super power* yang independen, Amerika Serikat perlu menahan ancaman dari negara *aggressor* untuk menciptakan keamanan yang stabil di negaranya. Hal ini dikarenakan jika keamanan negaranya terganggu, maka identitas Amerika Serikat sebagai negara *super power* akan dipertanyakan. Selanjutnya, pemimpin Amerika Serikat perlu mewujudkan integritas fungsional negaranya dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan dari struktur pemerintahan, masyarakat dan aliansi yang telah dimiliki dalam menanggapi isu hubungan internasional. Dalam permasalahan nuklir Korea Utara, masyarakat, kelompok kepentingan, struktur pemerintahan juga aliansi sama-sama menilai Korea Utara sebagai ancaman. Oleh karena itu, kepentingan yang ingin dicapai Amerika Serikat dari denuklirisasi Korea Utara adalah integritas fungsional.

Dari sisi *maintaining position*, Amerika Serikat berupaya untuk mencapai beberapa kepentingan juga. Pertama, Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan aliansi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam dokumen ringkasan strategi

pertahanan nasional Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat mampu mewujudkan denuklirisasi Korea Utara, maka Jepang dan Korea Selatan akan tetap mempercayai Amerika Serikat sebagai aliansi pertahanan mereka. Jika aliansi telah dipertahankan maka Amerika Serikat pun akan tetap memperoleh dukungan untuk mencapai kepentingan nasional lainnya.

Kedua, Amerika Serikat berusaha mewujudkan denuklirisasi karena mempertahankan prestise. Jika Amerika Serikat berhasil untuk mengeliminasi nuklir Korea Utara maka prestise Amerika Serikat sebagai super power yang menjaga ketertiban dunia juga akan tetap bertahan. Kepentingan terakhir yang akan dicapai apabila enuklirisasi terwujud, maka Amerika Serikat akan memperlihatkan bahwa *'lion'* akan tetap bisa mengontrol *'wolves'* untuk tidak mengganggu ketertiban yang telah ada. Menurut penulis, inilah kepentingan utama yang ingin di capai oleh Amerika Serikat melalui upaya denuklirisasi Korea Utara. Hal tersebut dikarenakan, Amerika Serikat sebagai negara yang memperoleh keuntungan dari sistem yang ada (*satisfied status quo state*) bagaimanapun akan berupaya mempertahankan sistem agar tidak berubah.

Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat cenderung berusaha untuk mencapai kepentingan untuk mempertahankan hubungan dagang di Asia Timur. Di sisi lain, Amerika Serikat juga berupaya

meningkatkan stabilitas politiknya melalui integrasi unit-unit domestiknya. Namun, Amerika Serikat lebih cenderung mencapai kepentingan untuk mempertahankan posisi, khususnya di Asia Timur. Hal ini dikarenakan kepentingan utama Amerika Serikat ialah untuk melindungi Korea Selatan karena terikat *Mutual Defense Treaty*. Dengan mempertahankan aliansinya maka Amerika Serikat akan tetap dapat mendominasi Asia Timur.

Daftar Pustaka

- Aldikawati, Mega. "Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya terhadap stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin." *Reunifikasi Korea*, 2012: 42-46.
- Amanda, Meidy. "Dilema Aliansi Amerika Serikat terkait Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Universitas Indonesia) 1 (2018): 159-169.
- BBC News Indonesia. Kim-Trump tandatangani 'kesepakatan' : Hubungan AS-Korut akan berbeda sama sekali. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-44447915> pada januari 2019
- BBC Indonesia. "Nuklir Korut :Korsel latihan Rudal, AS ancam 'pembalasan militer besar-besaran". 4 September 2017. Diaksesdari<https://www.bbc.com/amp/dunia-41144846>pada 10 desember 2019.
- CNN Indonesia. "ResponNuklir Korea Utara, AS Ancam Aksi Militer Skala Besar". 4 September 2017. Diaksesdari<https://m.cnnindonesia.com/internasional/201709033233257-113-239201/respon-nuklir-korea-utara-as-ancam-militer-skala-besar>pada 1 Desember 2019
- Davidson, Chase O. *Neoclassical Realism and The Collapse of the 1994 Agreed Framework*. Iowa State University, 2008.

- Dewitasari, Windhy. *Strategi Penangkalan Nuklir Korea Utara Periode 2003-2010*. Universitas Indonesia, 2011.
- Gray, Sarah. "These are the Biggest U.S. Trading Partners". 7 Maret 2018. Diakses dari <https://www.fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/> pada 15 Desember 2019
- Hwang, Jihwan. "Realism and U.S Foreign Policy toward North Korea." *World Affairs* (167), 2004: 15-29.
- Izharruddin, Thufeil. *Pengaruh Kebijakan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dalam Proses Reunifikasi Korea (2011-2013)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Jhonston, Alastair Lain. "Is china a Status Quo Power?" *International Security* (Harvard College and MIT Press) 27 (2003): 5-56.
- Jim Mattis. "National Defense Strategy of The United States of America". Departemen Pertahanan Amerika Serikat. 2018.
- Kamasa, Fransminggi. *Perang Korea*. Pustaka Narasi. 2014
- Kim, Min Hyung. "Why Provoke the Sno-US Competition in East Asia and North Korea's Strategic Choice". *Journal of Strategic Studies*. 2015:1-20
- LeBlanc, Paul dan Zachary Cohen. "Senate Democrats Urge Diplomatic Action Against North Korea As Trump Downplay Tests". CNN Politics. 6 September 2019. Diakses dari <https://amp.cnn.com/2019/09/06/politics/democrats-north-korea-trump-denuclearization-un/index.html> pada 15 Desember 2019
- Lim, Hee Jea. *Korea is Really Matter to U.S.? The Relationship about USFK and ROK-U.S. Alliance*. Halmstad University, 2011.
- Lind, Jennifer M. "Pacifism or Passing The Buck". *International Security*. MIT Press. 2004.
- Logan, Justin. "China, America, and Pivot to Asia." *Policy Analysis* (CATO Institute), 2013: 1-27.
- Marpaung, Edward Giovanni. *Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea (2010-2016)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2017.
- Mearshimer, Jhon. "The Tragedy of Great Power Politics". New York: W. Warton Company. Hlm. 157-158

- Nabil, Muhammad. "Diplomasi Six Party Talks dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009." *Jurnal Hubungan Internasional*, 2014.
- Permata, Inda Mustika. "Analisis Konstruktivisme : Perilaku Korea Utara terhadap Denuklirisasi." *Andalas Journal of International Studies* 2 (2018): 104-116.
- Rantung, Krisandhy Ertanto. *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara pada Masa pemerintahan Barrack Obama*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2016.
- Schweller, Randall L. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back in." *International Security*, 1994: 72-107.
- Schweller, Randall L. "Neorealism's Status Quo Bias: What Security Dilemma?." *Security Studies* (Ohio State university), 1996: 90-121.
- Schweller, Randall L. "Unanswered Threats: a Neoclassical Realist Theory of Underbalancing." *International Security* (MIT Press) 29 (2004): 159-201.
- Secretary of Defense. "Defense Budget Overview". United States Departement of Defense Fiscal. 2019
- SIPRI. *SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament, and International Security Summary*. Yearbook, Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2019.
- Syahrin, M Najeri Al. "Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara." *Journal of International Studies*, 2018: 116-135.
- Xu, Beina. "The China-North Korea Relationship. " *CFR Journal*, 2014: 1-6.
- Yeo, Andrew. "U.S. Military Base Realignment in South Korea. " *Peace Review* (Taylor&Francis Group), 2010: 113-120.
- Zelikow, Philip. *How Diplomacy with North Korea can Work*.(2018)

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini (Tulis deklarasi ini jika ana menggunakan bahasa Indonesia).

Biografi

Javira Ardiani Merupakan alumni dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Minat penelitiannya adalah mengenai isu-isu keamanan (security).

Bima Jon Nanda Merupakan Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Minat penelitiannya adalah

Zulkifli Harza Merupakan Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Minat penelitiannya adalah kajian keamanan dan ASEAN.